

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan**

**Author**

Muhammad Ridwan Manulusi<sup>1</sup>, Bahar Sinring<sup>2</sup>, A.M. Hasbi<sup>3\*</sup>

**Email**

[mridwan600@gmail.com](mailto:mridwan600@gmail.com)

[bahar.sinring@umi.ac.id](mailto:bahar.sinring@umi.ac.id)

[am.hasbi@umi.ac.id](mailto:am.hasbi@umi.ac.id)

**Afiliasi**

<sup>1</sup>*Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2, 3\*</sup>*Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesis penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Data yang didapat bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2015-2019. Metode Analisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi data panel berbantuan RStudio 4.0.4 untuk analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi*

## **Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi sudah menjadi isu penting dalam setiap kemajuan negara di dunia. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan tolak ukur peningkatan ataupun penurunan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu. Menurut Sukirno (2011:423) pertumbuhan ekonomi ialah alat untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Peningkatan kegiatan perekonomian harus didukung dari sisi pendanaan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional, pertumbuhan ekonomi nasional 5,02% pada tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,92%, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan melebihi Pertumbuha Ekonomi Nasional.

Salah satu ukuran capaian pembangunan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Angka- angka PDRB digunakan sebagai bahan perbandingan capaian pembangunan antar daerah. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah menggambarkan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan terjadi percepatan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019:

**Tabel 1. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (Dalam Juta Rupiah)**

Kab/Kota	Tahun					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Bantaeng	4.073.059,72	4.374.214,69	4.694.158,30	5.075.836,51	5.621.523,48	4.767.758,54
Barru	3.694.239,47	3.916.336,13	4.169.983,81	4.466.541,17	4.797.429,68	4.208.906,05
Bone	16.051.871,49	17.498.179,41	18.970.527,04	20.660.069,29	22.108.038,47	19.057.737,14
Bulukumba	6.774.321,27	7.232.838,24	7.730.913,32	8.121.327,63	8.567.455,14	7.685.371,12
Enrekang	3.622.706,31	3.899.586,30	4.166.404,70	4.302.051,17	4.535.550,62	4.105.259,82
Gowa	10.380.218,68	11.166.021,95	11.971.358,93	12.822.678,78	13.783.114,90	12.024.678,65
Kep. Selayar	2.723.951,19	2.924.716,09	3.147.388,58	3.422.669,55	3.684.739,26	3.180.692,93
Luwu	7.437.417,27	8.023.365,31	8.567.872,02	9.155.576,30	9.728.969,45	8.582.640,07
Luwu Timur	14.631.058,73	14.862.310,82	15.318.716,54	15.837.801,09	16.022.945,19	15.334.566,47
Luwu Utara	6.122.220,30	6.580.897,24	7.081.166,34	7.675.196,58	8.221.198,57	7.136.135,81
Makassar	88.828.146,57	95.957.638,04	103.826.155,90	112.568.414,88	122.465.829,00	104.729.236,88
Maros	10.916.729,15	11.953.999,17	12.768.318,40	13.558.738,06	13.726.282,66	12.584.813,49
Palopo	4.140.871,84	4.428.497,04	4.745.899,89	5.102.987,20	5.447.357,00	4.773.122,59
Parepare	3.843.716,15	4.107.805,85	4.394.324,35	4.639.404,86	4.947.790,35	4.386.608,31
Pinrang	9.677.333,52	10.397.105,92	11.212.623,63	11.987.443,92	12.770.078,59	11.208.917,12
Sidenreng Rappang	6.600.919,92	7.182.787,48	7.693.463,15	8.075.027,24	8.450.694,50	7.600.578,46
Sinjai	5.415.380,09	5.799.305,71	6.218.639,84	6.684.166,00	7.090.283,60	6.241.555,05
Soppeng	5.131.715,87	5.547.690,87	6.007.455,72	6.497.184,05	6.993.513,10	6.035.511,92
Takalar	4.931.544,19	5.405.320,37	5.803.944,31	6.190.674,12	6.616.253,76	5.789.547,35
Toraja Utara	3.782.795,53	4.085.687,91	4.421.680,18	4.778.534,83	5.140.012,28	4.441.742,15
Sul-Sel	10.939.010,86	11.767.215,23	12.645.549,75	13.581.116,16	14.535.952,98	12.693.769,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (2020)

Tabel 1. menunjukkan bahwa rata-rata PDRB Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir dipimpin oleh Kota Makassar yaitu sebesar 104.729.236,88 juta rupiah, kemudian yang terendah adalah Kabupaten Kep. Selayar sebesar 3.180.692,93 juta rupiah, Pertumbuhan PDRB di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan kinerja ekonomi di beberapa kabupaten/kota masih kurang baik, hal ini membuktikan bahwa banyak kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam peningkatan PDRBnya, meskipun secara garis besar Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kota Makassar yang menjadi ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pusat perekonomian. Oleh karena itu, wilayah Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar

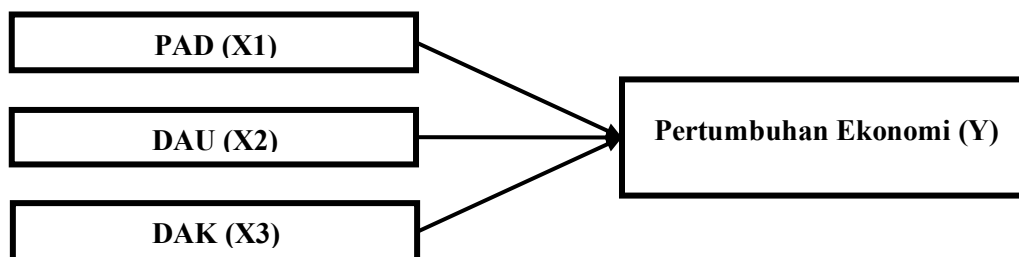
dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, akan tetapi wilayah ini mengakibatkan ketimpangan di beberapa kabupaten/kota lainnya karan.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengantur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing.

Menurut Ahmad Yani (2008:44) dalam Triani (2015), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pendapatan asli daerah (PAD), setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi.

Dana perimbangan terbagi atas tiga komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah (Triani: 2015).



*Gambar 1. Kerangka Konseptual*

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan, 2) Pendapatan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan, 3) Pendapatan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

## Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang terkait terhadap pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data pada penelitian ini Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Data yang digunakan berupa data time series dari Kabupten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, perpustakaan. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan program RStudio. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data time-series. model persamaannya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

## Hasil dan Pembahasan

Penentuan model Regresi Data Panel dapat dilakukan dengan 3 uji yang berbeda yaitu Chow test, Housman test, dan Lagrange Multiplier test yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih model terbaik manakah yang sebaiknya digunakan. Berikut Model Regresi Data Panel pada penelitian ini:

**Tabel 2. Uji Chow**

F	df1	df2	p-value
79.73	23	93	0.000

*Alternative hypothesis: significant effects*

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Dari Tabel 2, hasil empiris menyatakan bahwa H0 diterima, karena dilihat dari nilai signifikansinya yaitu Probabilitas dari Cross-section  $F < 0.05$  atau  $0.000 < 0.05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model.

**Tabel 3. Uji Hausman**

chisq	df1	p-value
40.47	3	0.000

*alternative hypothesis: one model is inconsistent*

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Dari Tabel 3, hasil empiris menyatakan bahwa H0 diterima, karena dilihat dari nilai signifikansinya yaitu Probabilitas < 0.05 atau 0,000 < 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Random-Effect Model. Berdasarkan hasil pengujian chow dan hausman diperoleh hasil yang sama maka tidak perlu dilakukan uji LM. Setelah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan model terbaik untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah “Fixed Effect Model”.

Selanjutnya dilakukan Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui uji Jarque Bera.

**Tabel 4. Uji Jarque Bera**

X-squared	1.1709
df	2
p-value	0.5568

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Tabel 4 dapat di lihat menghasilkan statistik uji Jarque Bera dengan probabilitas sebesar 0.5568. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas > level of significant ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini berarti residual yang diperoleh dari model regresi yang terbentuk dinyatakan berdistribusi normal.

Selanjutnya Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yakni dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF).

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

Variabel	VIF
PAD	1.959506
DAU	2.187743
DAK	1.306705

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dalam model regresi.

Selanjutnya dilakukan Uji heteroskedastisitas Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Breusch Pagan Godfrey dengan cara melihat nilai probability. Jika nilai probability lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  atau 5% maka data dalam penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Uji Heterokedestisitas**

<i>Studentized Breusch-Pagan test</i>	
BP	30.447
df	26
p-value	0.2495

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Hal ini terbukti dengan nilai probability > 0.05 (0.2495 > 0.050), artinya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya

Pada penelitian ini menggunakan model efek individu, yang diperhitungkan adalah pengaruh unit-unit cross-section atau individu dalam hal ini 24 Kabupaten/Kota provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan 24 variabel dummy yang mewakili ke-24 Kabupaten/Kota. Berdasarkan model hasil estimasi pada pembahasan sebelumnya tersebut diperoleh nilai intercept (konstanta) dan koefisien dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7. Model regresi data panel *fixed effect Model (FEM) LSDV***

Variable	Estimate	Std. Error	t-Value	Pr(> t )
Intercept	3.741	1.494	2.504	0.014
PAD	0.280	0.035	8.068	0.000
DAU	0.313	0.076	4.126	0.000
DAK	0.020	0.024	0.823	0.412

Sumber: Output RStudio, 2021

$$PDRB = 3.741 + 0.280PAD + 0.313DAU + 0.020DAK$$

Berdasarkan Tabel 7 intecept yaitu  $b_{0i} = 3.741$  yang artinya nilai PDRB untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015- 2019 sebesar 3.741 ketika PAD, DAU dan DAK tidak diperhatikan. a) Koefisien PAD sebesar 0.278344 yang berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuha Ekonomi (PDRB). Hal ini berarti terjadinya peningkatan PAD sebesar 1% maka akan meningkatkan Pertumbuha Ekonomi (PDRB) sebesar 0.278344, b) Koefisien DAU sebesar 0.310232 yang berarti bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Hal ini berarti terjadinya peningkatan DAU sebesar 1% maka akan meningkatkan Pertumbuha Ekonomi (PDRB) sebesar 0.310232, c) Koefisien DAK sebesar 0.020691 yang berarti bahwa DAK berpengaruh pos terhadap Pertumbuha Ekonomi (PDRB). Hal ini berarti terjadinya peningkatan DAK sebesar 1% maka akan meningkatkan Pertumbuha Ekonomi (PDRB) sebesar 0.020691.

Selanjutnya Uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t-statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara individual terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

**Tabel 8. Uji Parsial**

Variable	t-value	Pr(> t )
PAD	8.068	0.000
DAU	4.126	0.000
DAK	0.823	0.412

Sumber: Output RStudio, 2021

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel menunjukkan nilai t-value PAD sebesar 8.068 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan niali probabilitas PAD sebesar  $0.000 < 0.05$  menyebabkan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), nilai t-value DAU sebesar 4.126 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan niali probabilitas DAU sebesar  $0.000 < 0.05$  menyebabkan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan nilai t-value DAK sebesar 0.823 yang menunjukkan bahwa arah koefisien positif, sedangkan niali probabilitas DAK sebesar  $0.412 > 0.05$  menyebabkan  $H_a$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi**

<i>R-Squared</i>	<i>Adj. R-Squared</i>	<i>Total Sum of Squares</i>
0.993	0.991	64.275

*Sumber: Output RStudio, 2021*

Berdasarkan Tabel 9 besarnya nilai R-squared adalah 0.5735. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel (PAD, DAU, dan DAK) sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 0,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian seperti Investasi, Sumber daya Alam, Tenaga Kerja dan Kemajuan Teknologi

### ***Pembahasan***

#### ***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019.

Hal ini sejalan dengan penelitian Erza Agung yang berjudul pengaruh aglomerasi dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah, dimana variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Erza menjelaskan Hal ini sejalan dengan Teori Kutub Pertumbuhan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Dengan meningkatnya PAD yang diprosikan sebagai akumulasi modal berarti hal ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen tersebut yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari endogen atau di dalam daerah itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan PAD yang terdiri dari diantaranya pajak dan retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sangat bergantung dari intensitas kegiatan perekonomian yang dilakukan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2018) hasil penelitian menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### ***Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan Dana Alokasi Umum merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019.

DAU memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah untuk belanja modal. Hal ini tidak jauh beda dari peran PAD yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semakin besar proporsi DAU yang diterima pemerintah daerah dari transfer

pemerintah pusat maka semakin besar pula prospek pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pembiayaan guna untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti (2015) hasil penelitian menemukan DAU berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai positif.

### ***Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan Dana Alokasi Khusus bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sampai dengan 2019.

Belum optimalnya dampak yang diberikan dari DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan kurang tepatnya pengalokasian dan kelemahan-kelemahan tata kelola implementasi DAK (Bappenas, 2011). Perencanaan dan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah dilakukan secara top-down, dimana daerah tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan program atau kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan DAK. Hal tersebut berakibat pada kemungkinan bahwa DAK tidak diarahkan pada program atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Yang berarti tidak boleh disalah gunakan digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan. Pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat (Santosa, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2018) hasil penelitian menemukan Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini adalah 1) Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi, 2) Dana Alokasi Umum Positif dan Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi, dan 3) Dana Alokasi Khusus Positif dan tidak Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Pertumbuhan Ekonomi di 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi.

### **Referensi**

- Badan Pusat Statistik. 2020. Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020.
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). White Paper.
- Santosa, B. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Bisnis. Universitas Trisakti Jakarta.



- Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2010-2016. Yogyakarta: UNY.
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 7(1), 1-17.
- Sukirno, S., 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Triani, M. (2015). Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. (c), 9. Universitas Negeri Padang.